



KAPASITAS PEMERINTAH DESA DERMAJI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

**Diari Budi Utama^{1*)}, Hendrawan Bayu Prewito²⁾, Hendro Pratikno¹⁾,
Yanuar Udianto Kurniadi¹⁾, Hayatul Khairul Rahmat¹⁾**

¹⁾ Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Indonesia

²⁾ Program Studi Magister Strategi Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Indonesia

Abstrak

Kapasitas pemerintah desa dituntut untuk mampu merepon kebutuhan publik salah satu sektor yakni kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga hal ini diperlukan sikap respon cepat dari stakeholders sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa. Jumlah kejadian bencana longsor di setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2016, Kecamatan Lumbir yang paling sering terjadi sebanyak 20 kali. Desa Dermaji merupakan desa yang paling sering dilanda bencana longsor di Kecamatan Lumbir tercatat sebanyak 8 kali dari tahun 2014-2016. Pentingnya penelitian kapasitas Pemerintah Desa dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabuapten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif guna menggali informasi secara akurat dari informan yang berkompeten. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Dermaji belum membentuk regulasi penanggulangan bencana sebagai upaya mitigasi sehingga perlu didiskusikan formulasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat sebagai upaya legitimasi dan legalitas..

Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, Kebijakan, dan Risiko Bencana.

*Correspondence Address : diarbudiutama1@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i3.2020.598-606

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terlihat pada kapasitas aparatur pemerintah itu sendiri. Kapasitas aparatur pemerintah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, karena berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan akan dinilai dari kinerja aparatur pemerintah dengan komposisi kapasitas personel dalam organisasi tersebut. Kapasitas organisasi merupakan potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (Wardianto dalam Madiyono, 2016:20).

Dalam Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, kapasitas diartikan sebagai: "kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Putri, 2005). Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu; 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi, dll; 3) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (*attitude*), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era globalisasi ini kerap menjadi sorotan. Tak jarang berbagai sektor pemerintahan menjadi catatan penting untuk dievaluasi. Salah satu sektor penting dari pemerintahan adalah sektor kebencanaan. Bencana yang sering melanda Indonesia menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk mampu bersikap responsif, akuntabel dan profesional dalam memberikan pelayanan. Walaupun kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama, namun pemerintah menjadi penggerak utama dalam melakukan kebijakan maupun tindakan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan semangat pembangunan nasional pada elemen paling bawah di daerah dengan wilayah otonominya. Dijelaskan Lasmana (2017) bahwa Desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sehingga desa kini diberikan kewenangan seluas mungkin untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa aparatur pemerintah desa harus memiliki kecakapan dan kapasitas yang transparan dan akuntabel terlebih dengan adanya dana desa yang menjadi sorotan publik. Kaitannya dengan kapasitas aparatur desa, menurut (Asrori, 2014) tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.

Guna mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka perlu didukung dengan

kemampuan aparatur yang sesuai dengan harapan publik, Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:3) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Menurut Kartono (1993: 13) bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, menurut Syarif (1991: 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Menurut Aminah dan Susanto (2018) Kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kapasitas pemerintah desa dituntut untuk mampu merepon kebutuhan publik salah satu sektor yakni kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga hal ini diperlukan sikap respon cepat dari *stakeholders* sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa.

Menurut *World Bank* dan UNISDR dalam BNPB (2015:23) menjelaskan bahwa Indonesia berada pada ranking 12 sebagai negara yang memiliki kerentanan tinggi sehingga menyebabkan banyak korban akibat berbagai jenis bencana. Banjir, cuaca ekstrem, erupsi gunung api, tanah longsor dan kekeringan di Indonesia menyebabkan tingginya korban jiwa sejak tahun 1815-2015. Pada tahun 2016 tercatat telah terjadi 2.384 bencana, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.732 pada tahun 2015 (Rahmat & Alawiyah, 2020). Pada tingkat Provinsi, Jawa Tengah

merupakan Provinsi yang paling sering dilanda bencana tahun 2016 tercatat 639 kali disusul Provinsi Jawa Timur sebanyak 409 kali, Provinsi Jawa Barat 329 kali, Provinsi Kalimantan Timur 190 kali, dan Provinsi Aceh 83 kali (BNPB, 2016).

Kabupaten Banyumas merupakan daerah di Jawa Tengah yang sering dilanda bencana, tercatat 53 kali kejadian bencana menimpa Kabupaten Banyumas tahun 2016 (BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2016). Rekap kejadian dan kerugian bencana di Kabupaten Banyumas tahun 2016 tercatat jenis bencana longsor yang paling sering terjadi sebanyak 100 kali kejadian dengan jumlah kerugian mencapai Rp.791.000.000,00 (BPBD Kabupaten Banyumas, 2017). Jumlah kejadian bencana longsor di setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 - 2016, Kecamatan Lumbir yang paling sering terjadi sebanyak 20 kali. Desa Dermaji merupakan desa yang paling sering dilanda bencana longsor di Kecamatan Lumbir tercatat sebanyak 8 kali dari tahun 2014-2016 (BPBD Kabupaten Banyumas, 2017).

Dari data diatas, maka sangat diperlukan kapasitas Pemerintah Desa Dermaji dalam upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana adalah suatu hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian seperti hilangnya nyawa, cedera, kehilangan harta benda, terganggunya kehidupan dan aktivitas ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bahaya baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia serta kondisi yang rentan (Affeltranger, 2007; Rahmat *et al.*, 2020). Kajian manajemen bencana berkaitan erat dengan risiko, bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Maka pengurangan risiko bencana dalam siklus manajemen bencana dapat dilakukan dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas kemampuan.

Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik (Asrori, 2014).

Pentingnya penelitian kapasitas Pemerintah Desa dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabuapten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. Beberapa penelitian yang relevan mengenai kapasitas pemerintah desa diantaranya: Aminah dan Sutanto (2018) mengungkapkan bahwa kapasitas aparatur desa tergolong cukup namun belum optimal mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa; Mulyana dan Hermawan (2012) menemukan adanya peningkatan pemahaman tentang konsep manajemen kelembagaan; Sulismadi, Wahyudi, dan Muslimin (2017) mengungkapkan pemerintah desa masih mengalami masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain, minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa yang belum memahami tupoksinya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif guna menggali informasi secara akurat dari informan yang berkompeten. Selanjutnya, deskriptif yang dimaksud adalah peneliti akan mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Hal itu disebabkan oleh penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2012: 11). Lokasi penelitian ini di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah narasumber yang benar-benar memahami tentang topik penelitian ini. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten (Moleong, 2012: 186).

Objek dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Sugiyono, 2014; Pratikno *et al.*, 2020). Teknik pengumpulan data bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian pada sub aspek penelitian yang telah ditentukan dan bisa jadi pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai dinamika lapangan yang meliputi: wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles, A. Michael Huberman, & J Saldana, 2014: 31-33).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi kapasitas Pemerintah Desa Dermaji dalam pengurangan risiko bencana meliputi kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur desa diantaranya: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan teknis.

Kemampuan Dasar

Kemampuan dasar yang harus dimiliki aparatur desa melingkupi aspek regulasi serta tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pemerintah Desa Dermaji sejauh ini belum memiliki regulasi berupa peraturan desa mengenai penanggulangan bencana maupun regulasi terkait dengan desa tangguh bencana terlebih Desa Dermaji belum dicanangkan sebagai desa tangguh. Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji dalam penanganan bencana longsor saat itu dengan mengoptimalkan aparatur desa yang terdekat dengan lokasi bencana untuk menginformasikan kondisi terkini dan melakukan koordinasi dengan kelembagaan desa terkait.

Dari kemampuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, Pemerintah Desa Dermaji telah berupaya untuk terus konsisten dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan pelatihan kebencanaan bagi kelembagaan desa yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya terutama bagi Linmas, Karang Taruna, Satgas RT maupun RW. Komitmen yang dipegang kepala desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya sektor kebencanaan menjadi acuan untuk aparatur desa dalam bertindak secara responsif dan komprehensif.

Pada pembahasan aspek regulasi, Pemerintah Desa Dermaji yang sejauh ini belum memiliki regulasi berupa Peraturan Desa mengenai penanggulangan bencana sebetulnya sangat berpengaruh pada kegiatan yang dijalankan dalam agenda

pelatihan manajemen bencana, sehingga sangat diperlukan upaya percepatan pembuatan regulasi supaya tidak menghambat pada pelatihan kebencanaan yang akan diselenggarakan. Menurut Asrori (2014) bahwa regulasi kebijakan desa telah diambil, baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten akan berpengaruh terhadap kemampuan teknis perangkat desa. Aspek regulasi ini sangat diperlukan percepatan baik pada tingkat daerah sampai dengan tingkat desa dalam percepatan pembuatan peraturan desa mengingat pentingnya aspek pelayanan dalam bidang kebencanaan.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana sangat direkomendasikan untuk pencangan bagi Desa Dermaji mengingat belum adanya regulasi kebencanaan. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, dapat melaksanakan program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Dermaji dalam pelayanan publik di sektor kebencanaan sudah menunjukkan sikap responsif dimana menurut Aminah dan Susanto (2018) Kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan aparat desa dengan upaya responsif dan partisipasi

warga yang saling berkolaborasi sangat mendorong upaya penanggulangan bencana.

Kemampuan Manajemen

Dimensi kemampuan manajemen sebagai unsur dalam kapasitas pemerintah desa harus dipastikan mumpuni dalam pengelolaan sumber daya baik SDM, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran. Sehingga kapasitas aparatur pemerintah desa dapat menjamin manajemen pelayanan publik khususnya kebencanaan dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek manajemen SDM, Pemerintah Desa Dermaji memiliki jumlah aparatur sebanyak 14 orang dan jumlah kelembagaan desa sebanyak 11 lembaga. Dari hasil wawancara, bahwa manajemen SDM terus berupaya mengadakan pelatihan bagi aparatur desa, kelembagaan desa serta relawan bencana pada tingkat desa dengan basis gotong royong. Penguatan elemen-elemen kelembagaan desa serta komunikasi dan koordinasi antar kelembagaan desa menjadi faktor kuat untuk menjalin kolaborasi yang tepat.

Sesuai dengan pernyataan Asrori (2014) bahwa dalam Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme partisipatif yang

tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih demokratis.

Sementara pada manajemen aset dan anggaran, Pemerintah Desa Dermaji telah menginventarisasi aset desa dalam pemenuhan kebutuhan respon terhadap bencana, begitupun dengan anggaran yang sudah dipetakan besaran anggaran yang dimuat dalam APBDes untuk kebutuhan penanggulangan bencana baik pembelian peralatan maupun anggaran pelatihan kebencanaan dengan transparan dan akuntabel. Asrori (2014) bahwa perangkat desa dalam mengelola aset desa belum berfikir asset desa dikelola untuk kepentingan desa melalui upaya-upaya inventarisasi, pengembangan serta pendistribusiannya kembali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen keuangan desa yang memadai.

Kemampuan Teknis

Kapasitas aparatur desa dalam hal kemampuan teknis memberikan gambaran pada publik mengenai keterampilan aparatur dalam menyusun dokumen-dokumen kelengkapan administrasi. Beberapa kemampuan keterampilan teknis yang harus dimiliki aparatur desa diantaranya: penyusunan administrasi desa, dan penyusunan perencanaan pembangunan dalam pengurangan risiko bencana. Dalam hal pengurangan risiko bencana, Pemerintah Desa Dermaji harus mampu menyusun dokumen administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pendataan kebencanaan. Disamping itu, penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan regulasi mengenai penggunaan anggaran kebencanaan dengan transparan dan akuntabel.

Rencana pembangunan sangat perlu diperhatikan Pemerintah Desa Dermaji dalam suatu dokumen perencanaan sebagai upaya sikap respon dalam pengurangan

risiko bencana yang luarannya dibentuk peraturan desa dalam mendukung pengurangan risiko bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dermaji dalam kemampuan teknis pembuatan regulasi perdes memang sejauh ini belum dibentuk kedalam regulasi penanggulangan bencana sebagai upaya mitigasi, namun rencana kedepan akan segera dibuatkan mengingat pentingnya pelayanan publik di sektor kebencanaan. Disamping itu, dalam penyusunan rencana pembangunan dalam pengurangan risiko bencana harus dirumuskan formulasi kebijakan dari mulai sistem, manajemen tata kelola, SOP serta regulasi dengan lembaga yang menjalankan dari hasil rumusan kebijakan tersebut.

Hal penting lainnya dalam merumuskan pembangunan pada pengurangan risiko bencana harus didukung dengan partisipasi masyarakat sehingga regulasi yang dibuat benar-benar berkualitas yang berbasis legitimasi dan legalitas yang berangkat dari usulan dan dukungan masyarakat.

Menurut Aminah dan Susanto (2018) bahwa pemahaman aparat desa tentang tahapan penyusunan rencana pembangunan desa (RPJMDesa dan RKPDesa) yaitu: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota; penelitian keadaan desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; penyusunan rancangan RPJM desa; penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan penetapan RPJM desa.

Menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017) bahwa kekhawatiran atas kualitas kebijakan yang buruk pada kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat

dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

SIMPULAN

Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji dalam pengurangan risiko bencana masih belum didukung dengan regulasi yang ada, padahal kemampuan aparat desa dan kelembagaan desa sudah mumpuni dalam pengetahuan tugas pokok dan fungsi pelayanan disektor kebencanaan. Manajemen SDM, aset dan keuangan sudah dijalankan sesuai apa yang diusulkan dalam musyawarah pembangun desa sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan desa dengan meningkatkan kualitas SDM serta menjalin komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan relawan bencana di desa. Pada aspek kemampuan teknis, Pemerintah Desa Dermaji belum membentuk regulasi penanggulangan bencana sebagai upaya mitigasi sehingga perlu didirumuskan formulasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat sebagai upaya legitimasi dan legalitas berdasarkan usulan dari partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada jajaran Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, BPD Desa Dermaji, kelembagaan di Pemerintahan Desa Dermaji serta relawan bencana yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang belum kami sebutkan yang telah membantu atas kelancaran dalam penyusunan penelitian kami.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Cece. Wijaya. 1991. Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Affeltranger, B. (2007). *Hidup Akrab dengan Bencana: Sebuah Tinjauan Global Tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Bencana*. Jakarta: MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.
- Aminah, Sitti & Susanto, Hari Prasetyo. 2018. Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Jurnal Matra Pembaruan* 2 (3) (2018): 149-160.
- Anonim, 2002, Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisasi. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.
- Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*. Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014: 101 – 116.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Indonesia's Disaster Risk Management Baseline Status Report 2015: Towards Identifying National and Local Priorities for the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2016. Diagram Lima Provinsi dengan Jumlah Kejadian Bencana Terbesar Tahun 2016. <http://dibi.bnnpb.go.id/data-bencana>.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. 2017. Rekap kejadian dan kerugian bencana di Kabupaten Banyumas tahun 2016.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2016. sebaran kejadian bencana tertinggi per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2016.
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1993 “Pemerintahan dan Kepemimpinan”, Rajawali Press: Jakarta.
- Lasmana, Hafiz. 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pangguk Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017.
- Madiyono, Imam. 2016. “Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*. Vol.4 No. 2 November Tahun 2016.
- Miles. Mathew B. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, Methods Sourcebook* (3rd Ed). Sage Publications.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, N., Meiliyana, M., & Hermawan, D. (2012). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa. In Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandar Lampung: Dies Natalis FISIP Unila. Retrieved from

- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427-436.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Putri,Vera Jasini, 2005, Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 455-461.
- Ramdhani & Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *ARISTO*, 5(2), 216-258. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I2.487>
- Syarif, Roesli, 1991, "Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan", Bina Aksara. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.